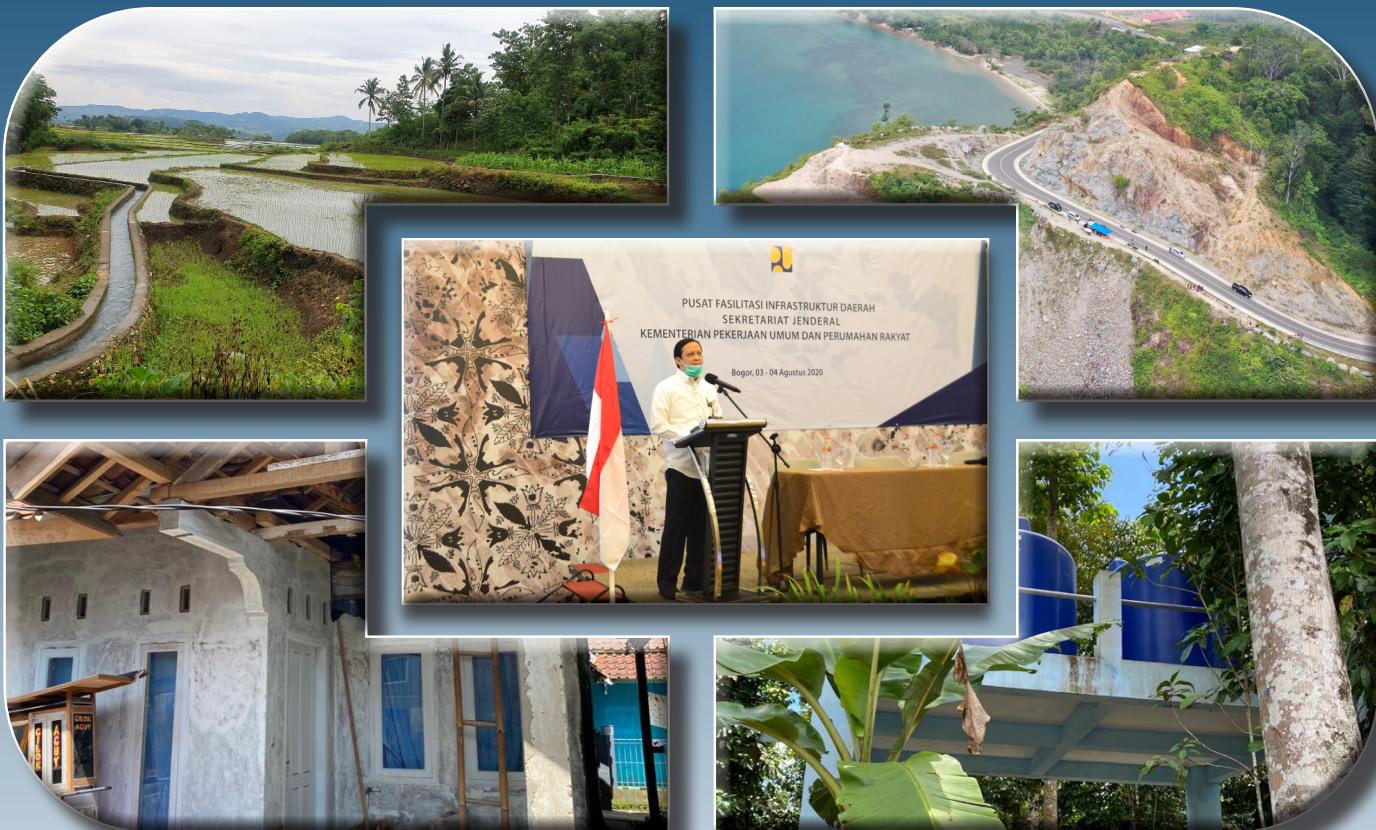


BULETIN PFID

• • • • FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH • • • •

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAK BIDANG IRIGASI, JALAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TA 2020



KONSULTASI PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK INFRASTRUKTUR PUPR TA. 2021

MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN DAK BIDANG IRIGASI
DI PULAU SUMBA, NTT

EVALUASI KEGIATAN PERENCANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
JALAN DAN JEMBATAN TA. 2021

POTRET KABUPATEN MANGGARAI
BARAT DALAM PELAKSANAAN
DAK AIR MINUM, SANITASI, DAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

CATATAN TIM REDAKSI

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) bertugas untuk meningkatkan kemantapan infrastruktur PUPR daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan air; konektivitas dan aksesibilitas bagi penguatan daya saing; dan layanan infrastruktur dasar sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. PFID berusaha untuk terus menerus melaksanakan kegiatan mulai dari tahap perencanaan; pemrograman; pembinaan dan pengawasan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur daerah demi tercapainya tugas diatas agar dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Buletin PFID ini berisi tentang peraturan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 4 (empat) bidang di PFID yaitu Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan, Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, dan Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman. Buletin PFID Edisi ke-IV Oktober - Desember Tahun 2020 ini bertema tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Konsultasi Program DAK Fisik untuk pengesahan Rencana Kegiatan (RK) pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2021.

Selamat membaca.

Redaksi

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung

Anita Firmanti

Penanggung Jawab

Riono Suprapto

Dewan Redaksi

Anum Kurniawan
Dedy Gunawan
Nova Dorma Sirait
Andie Pramudita Said
Wara Novela

Pemimpin Redaksi

Rosita Darmastuti

Anggota Redaksi

Gunawan, Hidemiwan,
Sari Satria, Desi Meriana,
Irma Rahmawati, Indah
Indriaspriati, Leviana Okvianty,
Rethon M. Canopy

Penyunting Redaksi

Gede Krisna, Arbi Sani,
Annisa Nurlita.A

Bagian Produksi

Agus Sugiono, Dewi Udiarti,
Zamzuli, Asep Sultoni

Bagian Distribusi

Dodi Herdiawan, Agung Tego

Kontributor

Nova Dorma Sirait, Anum
Kurniawan, Hidemiwan
Desi Meriana, Indah Indriaspriati,
Reza Wahyu.P, Brigitta Yolanda,
Sinta Nur Indah, Rizky Ananda,
Damar Sasongko, Pujianti Rahayu,
Muhamad Aminudin Aziz

Desain

Prayudi Anggia

Alamat Redaksi

Gedung Heritage PUPR Lt.4
Jl. Pattimura No.20,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
12110,



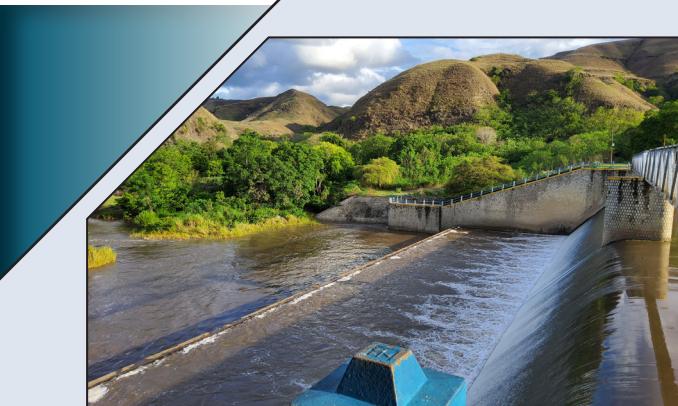
021-27932834



pfid.setjen@gmail.com



@pusatfid



**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN DAK
BIDANG IRIGASI TA 2020
DI PULAU SUMBA,
NUSA TENGGARA TIMUR**

5

11

**KONSULTASI PROGRAM DAK
BIDANG IRIGASI TA 2021**



14

**KONSULTASI PROGRAM
DAK BIDANG JALAN**

17

**EVALUASI KEGIATAN
PERENCANAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG
JALAN DAN JEMBATAN
TA. 2021**





**UJI COBA PELAPORAN
CAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT (SPM
PUPR) BERBASIS APLIKASI**

21

**22 POTRET KABUPATEN
MANGGARAI BARAT
DALAM PELAKSANAAN DAK
AIR MINUM, SANITASI,
DAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN**



**KONSULTASI PROGRAM
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
FISIK INFRASTRUKTUR PUPR
TA. 2021**

25

**PENYUSUNAN SKP DAN
INPUTTING E-KINERJA
(BOGOR 06-08 OKTOBER 2020)**

28





 Di Waikelo

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAK BIDANG IRIGASI TA 2020 DI PULAU SUMBA, NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh : Nova Dorma Sirait
Indah Indriasputra
Damar Sasongko

Pulau Sumba merupakan sebuah pulau pada ujung tenggara Indonesia dengan luas 11.059 km persegi dan populasi sekitar 810 ribu jiwa. Administrasi pulau ini terbagi menjadi empat Kabupaten dengan kondisi iklim yang kering serta karakteristik medan yang didominasi padang rumput dan batuan karang. Hal ini menjadikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air sebuah tantangan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sesuai dengan amanat Permen PUPR No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur PUPR, Bidang Pengelolaan Sumber Daya

Air (PSDA) Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi TA 2020 pada hari Rabu, tanggal 9-12 Desember 2020 di Pulau Sumba.

Tim monitoring dan evaluasi terdiri atas Kabid Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air PFID beserta jajaran tim, didampingi oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Provinsi Nusa Tenggara serta Kepala Seksi Pelaksanaan OP BBWS Nusa Tenggara II. Kunjungan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui hasil pelaksanaan kerja DAK TA 2020 pada Pulau Sumba.

Kegiatan monev diawali dengan rapat koordinasi bersama perwakilan seluruh Kabupaten di Pulau Sumba pada hari Kamis, 10 Desember 2020 di Kantor Dinas PUPR Kab. Sumba Timur. Rombongan Pusat FID diterima oleh Kepala Dinas PUPR Sumba Timur, dihadiri oleh perwakilan Dinas PUPR Kab Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Pada rapat koordinasi dibahas pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Irigasi TA 2020, serta tantangan yang dihadapi para pemda di Pulau Sumba. Berdasarkan hasil diskusi diketahui bahwa sebagian besar Pemda di Pulau Sumba mengerjakan kegiatan DAK Bidang Irigasi tahun 2020 menu rehabilitasi jaringan irigasi dengan dana cadangan DAK.



Diskusi Tim Kunjungan dengan
Perwakilan Dinas PUPR

Permasalahan yang saat ini dihadapi Dinas PUPR se-Pulau Sumba dalam pelaksanaan infrastruktur antara lain terbatasnya area yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian, sulitnya akses ke lokasi usulan irigasi dan jarak sumber air yang jauh dari lahan pertanian menyebabkan nilai usulan melambung tinggi. Untuk itu perlu Pemda perlu serius dalam memelihara Jaringan Irigasi yang telah dibangun. Salah satunya dengan menganggarkan dana OP yang cukup setiap tahun. Dalam pembahasan juga diketahui bahwa Kabupaten Sumba Tengah memiliki luasan potensi daerah irigasi yang cukup besar dan berpotensi dikembangkan menjadi food estate sehingga direkomendasikan untuk bersurat kepada Kementerian PUPR.

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan di D.I. Analuku yang dicapai dengan waktu tempuh selama ± 1 jam dari kantor Dinas PUPR Kab. Sumba Timur. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan ditemukan bahwa DAK



Hasil Rehabilitasi Saluran D.I. Analuku DAK TA 2020

Cadangan TA 2020 di D.I. Analuku digunakan sepenuhnya untuk merehabilitasi saluran. Progres pekerjaan telah 100% selesai namun dana yang diterima baru mencapai 79,47%.

Akses menuju DI Analuku melalui medan berat berupa bukit-bukit batu karang dengan kondisi jalan akses terjal dan licin. Driver menilai cukup berbahaya untuk melanjutkan perjalanan dengan mobil hingga sampai saluran di dasar tebing sehingga Tim Monev PFID hanya dapat mengamati saluran DI Analuku dari kejauhan.

Dalam kunjungan pada DI Analuku ini Tim Monev PFID menemui Kepala Dusun Mondu untuk mengumpulkan testimoni terkait hasil pelaksanaan kegiatan. Melalui dialog singkat ditemukan bahwa keberadaan saluran DI Analuku sangat bermanfaat bagi warga Dusun Mondu karena selain berfungsi mengaliri lahan, warga juga memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.



Jalan akses dan medan menuju lokasi yang sulit



Hasil Rehabilitasi DI Kambu Pahang

Selanjutnya, tim Monev PFID mengunjungi DI Kambu Pahang yang juga merupakan kewenangan Kab. Sumba Timur. Pekerjaan pada DI Kambu Pahang merupakan rehabilitasi sayap bendung pada tahun anggaran 2019 dengan progres sudah mencapai 100 persen. Pada DI Kambu Pahang, air tersedia sepanjang tahun dengan debit yang cukup besar. Masalah utama pada DI ini adalah air cukup berlumpur sehingga tingkat sedimentasi tinggi hingga membentuk "pulau" pada bagian hilir bendung.

Perjalanan dilanjutkan ke DI



Kambaniru yang merupakan keweningan BWS Nusa Tenggara II. Berlokasi di Desa Lamba Napu, DI Kambaniru merupakan satu satunya Irigasi teknis pada Kabupaten Sumba Timur dengan luas areal sawah dialiri mencapai 1440 Ha. Pada DI Kambaniru terdapat sebuah jembatan besi melintasi Bendungan menghubungkan dua desa. Jembatan ini dapat dilalui kendaraan bermotor roda dua. Permasalahan pada DI Kambaniru antara lain pintu penguras sudah tidak dapat dioperasikan maksimal, terdapat sedimentasi pada hilir bendung, serta terdapat pembangkit listrik mikrohidro yang telah hanyut sebagian oleh banjir.



Jembatan DI Kambaniru menghubungkan dua desa

Pada hari berikutnya, tim Monev PFID mengunjungi DI Kabukarudi yang merupakan kewenangan Kabupaten Sumba Barat. Pekerjaan DAK Irigasi pada DI ini berupa rehabilitasi saluran, dengan sebagian segmen saluran berupa saluran tertutup. Sumber air DI ini berupa mata air yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk keperluan sehari-hari. Lokasi sumber air yang cukup dekat dengan pemukiman warga berdampak pada kualitas air irigasi. Pada saat hujan deras, air dapat meluap hingga melimpas keluar saluran, namun pada saat musim kemarau, air tidak sampai ujung saluran. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya petugas pintu air sehingga pintu dapat dioperasikan oleh petani setempat tanpa pengawasan.



 Saluran tertutup pada DI Kabukarudi



 Sumber air dari mata air, pintu air tanpa petugas



 Sumber air DI Waikelo

Pada perjalanan selanjutnya, tim Monev PFID mengunjungi DI Waikelo yang merupakan kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada DI Waikelo terdapat sebuah Gua yang merupakan salah satu tujuan wisata pada Kabupaten Sumba Barat. Melalui Gua ini mengalir sungai bawah tanah yang menjadi sumber air jaringan irigasi ini. Debit air yang sangat besar pada DI Waikelo dimanfaatkan untuk menggerakkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, namun sayangnya kondisi Pembangkit Listrik ini tidak terawat.



Penggunaan batu karang untuk material saluran

Selanjutnya, tim Monev PFID mengunjungi lokasi terakhir dalam rangkaian perjalanan, yaitu DI Loko Teru yang merupakan kewenangan Kabupaten Sumba Barat Daya. Lokasi DI ini cukup terisolir, untuk mencapai lokasi pekerjaan tim Monev PFID harus menempuh perjalanan satu jam lebih menembus hutan melalui jalan tebing curam. Saat sampai di lokasi, tim Monev PFID dihadapkan pada sebuah saluran pasangan batu karang panjang menembus hamparan persawahan luas bertingkat-tingkat.

Pekerjaan Rehabilitasi saluran DI Loko Teru menggunakan pasangan batu karang karena jumlahnya cukup berlimpah dan dapat ditemukan dengan mudah di sekitar lokasi pekerjaan. Seperti DI lain di pulau Sumba, DI Loko Teru merupakan Irigasi Sederhana tanpa fasilitas untuk mengatur air. Sepanjang saluran ditemukan banyak lubang oncoran dengan berbagai ukuran sehingga sawah di ujung saluran berpotensi tidak mendapat cukup air di musim kemarau. Lubang-lubang ini seharusnya dira-

pikan dengan menggunakan pipa PVC.

Berdasarkan temuan di lapangan, maka tim monitoring dan evaluasi PFID merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagian tengah pulau Sumba memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi food estate, sebaiknya Pemda mengirimkan surat kepada Kementerian PUPR melalui PFID untuk mendapatkan dukungan dan arahan.
- b. Terdapat kekurangan pada jumlah dan tingkat kompetensi SDM pengelola irigasi di Pulau Sumba, sehingga diharapkan agar petugas regulator terkait dapat mendampingi untuk memberikan pemahaman.
- c. Bagian timur pulau Sumba beriklim kering dan memiliki medan yang ekstrim, sehingga Pemda perlu meningkatkan kualitas pekerjaan pemeliharaan dan berusaha membuat jalur akses ke lokasi yang akan diusulkan.

d. Sebagian Pemda sudah mulai melaksanakan pendataan e-PAKSI. Pelaksanaan e-PAKSI perlu menjadi perhatian Pemda, karena akan menjadi syarat pengusulan DAK Bidang Irigasi TA 2022.

Penyelenggaraan kegiatan DAK Bidang Irigasi tahun 2020 oleh seluruh kabupaten di Pulau Sumba secara keseluruhan telah berjalan cukup baik, meskipun masih ada beberapa daerah irigasi yang berpotensi untuk dilakukan peningkatan. Dengan termonitornya pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Pulau Sumba, diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemda dalam meningkatkan pengelolaan irigasi di Pulau Sumba sehingga petani dan masyarakat setempat mendapat manfaat lebih dari pengelolaan irigasi yang baik serta memberikan gambaran untuk Pemerintah Pusat dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan irigasi ke depan ■

KONSULTASI PROGRAM DAK BIDANG IRIGASI TA 2021

Oleh : Nova Dorma Sirait
Indah Indriaspri
Rizky Ananda



Kegiatan Konsultasi Program DAK Bidang Irigasi secara online

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memeratakan pembangunan antar daerah. Kerangka pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2020-2024 memfokuskan pada 3 (tiga) isu utama, yaitu: (1) Infrastruktur mendukung pemeraataan pembangunan; (2) Infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi; dan (3) Infrastruktur mendukung pembangunan perkotaan. Sesuai dengan salah satu arahan presiden yang termuat dalam 7 agenda pembangunan, yaitu memperkuat infrastruktur guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, maka diperlukan

jaminan terhadap ketahanan kebencanaan infrastruktur, air tanah, air baku aman berkelanjutan serta terciptanya waduk multiguna dan modernisasi irigasi.

Kementerian PUPR selaku kementerian teknis memiliki peran dalam pengalokasian DAK TA. 2021, yang dimulai dari perumusan kebijakan DAK, pengusulan kegiatan oleh Pemda, penilaian data teknis, penilaian awal usulan rencana kegiatan oleh Pemda, penilaian sinkronisasi dan harmonisasi, serta penilaian rencana kegiatan setelah ditetapkannya alokasi DAK Fisik pada Bulan September 2020. Alokasi untuk DAK Bidang Irigasi tahun 2021 ialah sebesar Rp. 3 T yang tersebar dalam 29 Provinsi dan 377 Kabupaten/Kota. Dengan telah ditetapkannya alokasi DAK Bidang Irigasi TA. 2021, maka ta-

hapan/proses yang perlu dilakukan yaitu penyusunan Rencana Kegiatan (RK) yang kemudian akan dilakukan penilaian melalui kegiatan Konsultasi Program DAK Bidang Irigasi TA. 2021.

Konsultasi program ini diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan pada hari pertama pembukaan acara oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, dilanjutkan dengan sesi panel dengan narasumber dari Ditjen Sumber Daya Air dan Kepala Bidang Pelaksanaan DAK SDA. Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi desk; hari kedua sampai dengan hari ketiga acara masih dilanjutkan sesi desk hingga seluruh OPD diharapkan dapat menyelesaikan pembahasan bersama Pemerintah Pusat dan menghasilkan dokumen RK sebagai salah satu tahapan untuk memulai kegiatan DAK di daerah masing-masing.



Kegiatan Verifikator Program DAK Bidang Irigasi secara online

Penilaian usulan RK dilakukan dengan memverifikasi kesiapan data teknis dan dokumen pendukung. Kegiatan ini dilakukan secara daring/online mengingat kondisi Pandemic Covid-19 yang sedang melanda negara Indonesia. Mengingat banyaknya Pemda yang mendapatkan alokasi DAK Bidang Irigasi TA. 2021 serta menimbang kondisi jaringan internet dimasing-masing daerah, maka kegiatan Konsultasi Program DAK Bidang TA. 2021 dilakukan dalam 4 Gelombang, yaitu:

1. Gelombang 1 diselenggarakan pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020 di Hotel Horison Ciawi, untuk pembahasan dengan Pemerintah Daerah dari Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur.
2. Gelombang 2 diselenggarakan

pada tanggal 02 - 06 November 2020 di The Mirah Hotel Bogor, untuk pembahasan dengan Pemerintah Daerah dari Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Gelombang 3 diselenggarakan pada tanggal 09 - 13 November 2020 di Hotel Horison Bekasi, untuk pembahasan dengan Pemerintah Daerah dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.
4. Gelombang 4 diselenggarakan pada tanggal 16 - 20 November 2020 di Hotel Grandzuri Tanggerang, untuk pembahasan de-

ngan Pemerintah Daerah dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung.

Kegiatan Konsultasi Program dilaksanakan dengan mengundang 406 Pemda, persentase kehadiran sebesar 98% atau sekitar 396 Pemda yang mengikuti kegiatan Konsultasi Program. Hasil dari pelaksanaan konsultasi program sebanyak 4 gelombang yaitu terdapat 201 Pemda yang sudah menyelesaikan pembahasan RK, sedangkan 205 Pemda lainnya belum menyelesaikan pembahasan RK dengan rincian: 90 Pemda yang belum menyelesaikan perbaikan-perbaikan, terdapat 46 Pemda yang perlu mengupload kembali perbaikan untuk dapat menyelesaikan pembahasan RK dan terdapat 69 Pemda yang akan melakukan pembahasan teknis dengan verifikator 2.



 Tim DAK Bidang Irigasi

melihat masih adanya Pemda yang belum menyelesaikan pembahasan RK, maka Bidang Pelaksanaan DAK SDA, Pusat FID menyelenggarakan kegiatan Pasca Konsultasi Program Penyusunan Rencana Kegiatan DAK 2021 Bidang Irigasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 - 27 November 2020 di The Mirah Hotel Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melanjutkan pembahasan antara Pusat dan Daerah terkait RK yang belum selesai diverifikasi pada saat pelaksanaan kegiatan Konsultasi Program.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk Menyelesaikan verifikasi pembahasan serta persetujuan terkait Rencana Kegiatan DAK Bidang Irigasi TA. 2021, dan sebagai sarana untuk koordinasi secara langsung antara Pemerintah Daerah, Balai, dan Pusat.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan ini ialah permasalahan jaringan internet baik dari



Pemerintah Daerah, Balai, ataupun Pusat yang dimana sangat diperlukan karena kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Selain itu juga terdapat pemda yang tidak langsung merevisi perbaikan-perbaikan yang diminta oleh verifikator yang menyebabkan pembahasan verifikasi berlangsung cukup lambat jika dibandingkan dengan pelaksanaan secara langsung.

Pelaksanaan Konsultasi Program dan Pasca Konsultasi Program DAK 2021 Bidang Irigasi diikuti oleh seluruh Pemda yang mendapatkan alokasi DAK Irigasi TA. 2021, namun terdapat 8 Pemda yang tidak dapat menyelesaikan pembahasan Rencana Kegiatan, dengan total alokasi yang tidak tersalur sebesar Rp. 25.574.921.000 yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bungo, Kabupaten Indra-

mayu, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Samarinda serta Kota Tomohon.

Selain itu juga terdapat 24 Pemda yang tidak menggunakan sebagian alokasi DAK Bidang Irigasi TA. 2021 dengan total alokasi yang tidak digunakan sebesar Rp. 71.399.115.991. pemotongan alokasi dilakukan karena ketidaksiapan Pemda terkait dokumen teknis maupun data pendukung. Dengan demikian, jumlah Pemda yang memanfaatkan DAK Bidang Irigasi TA. 2021 ialah sebanyak 398 Pemda dengan total alokasi sebesar Rp. 2,905 T. Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi ini diharapkan dapat memenuhi target Pemerintah yang tertuang dalam RPJMN ■

KONSULTASI PROGRAM DAK BIDANG JALAN

Oleh : Brigitta Yolanda
Sinta Nur Indah



Tim DAK Bidang jalan bersama kepala pusat FID

Acara konsultasi program ini dalam rangka menyepakati kegiatan fisik dan penunjang yang menjadi prioritas nasional serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka sinkronisasi, pengefektifan dan sinergisasi pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur jalan yang didanai dari DAK.

Kebijakan pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur diharapkan dapat diarahkan pada pemenuhan kebijakan nasional yaitu:

- 1) Pemenuhan terhadap prioritas nasional.
- 2) Dukungan terhadap kebijakan afirmatif untuk pembangunan daerah yang mendukung infrastruktur ekonomi berkelanjutan dan ketahanan pangan.



Diskusi Verifikator bidang jalan Pusat FID

Rencana RPJMN 2020-2024 salah satunya target kemampuan jalan Provinsi 75% dan Kabupaten/Kota 65%. Dengan kondisi yang mantap dapat mewujudkan ke mandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, melalui pencapaian kedaulatan pada sektor ekonomi strategis sehingga dapat

mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Adapun poin pembahasan dari penyelenggaraan acara konsultasi program adalah:

- 1) OPD menyusun kegiatan DAK yang akan dituangkan dalam format Rencana Kegiatan sesuai dengan prioritas BA Bappenda untuk DAK Reguler dan BA



Kegiatan Konsultasi Program DAK TA 2021 Bidang Jalan

- Bappenas untuk DAK Penugasan.
- 2) OPD melakukan input nama ruas, volume, harga satuan dan kegiatan penunjang ke dalam aplikasi KRISNA.
 - 3) PFID memverifikasi Rencana Kegiatan fisik dengan mengecek detail readiness criteria pada setiap kegiatan dan kegiatan penunjang tidak lebih dari 5% nilai pagu.
 - 4) Menyiapkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan DAK.

Tahapan Verifikasi Rencana Kegiatan terdiri dari 3 tahapan, yakni:

- 1) Verifikasi Level Provinsi. Pada kegiatan verifikasi level provinsi pihak Satker P2JN/Balai, melakukan pengecekan data teknis secara tatap muka terhadap ruas-ruas yang disetujui dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran yang Terintegrasi, terdiri dari:
 - a) Kesesuaian rencana penanganan kegiatan dengan Kri-

teria kelengkapan:

- Harga Perkiraaan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang berlaku;
 - Back up volume per item pekerjaan;
 - Perhitungan desain tebal perkerasan jalan, desain jembatan dan bangunan pelengkap (jika ada);
 - Gambar Rencana (minimal gambar typical cross section);
 - Kesiapan lahan; dan
 - FS jaringan jalan (jika diperlukan).
- b) Kewajaran harga satuan material dan bahan sesuai edaran terbaru dan kemudian dari hasil Tahap Verifikasi level provinsi OPD Dinas PU yang sudah mendapat persetujuan teknis dari Satker P2JN/Balai dapat menginput dokumen administrasi secara online pada aplikasi SiPDJD.

- 2) Verifikasi Level 1 Pusat. OPD yang sudah mendapatkan nomor antrian melalui aplikasi SiPDJD dapat mengasistensikan dokumen administrasi kepada Verifikasi Level 1 Pusat, Verifikasi Level 1 Pusat mempunyai tugas memeriksa dokumen administrasi terkait dengan:
- a) Kesesuaian antara pagu yang berada dalam RK dengan alokasi dana yang sudah ditetapkan Kementerian Keuangan.
 - b) Kesesuaian antara ruas jalan yang diusulkan dalam RK dengan berita acara sinkronisasi dan harmonisasi DAK;
 - c) Kesesuaian antara jenis penanganan dengan kebutuhan kondisi lapangan yang ada.
 - d) Memastikan proses asistensi RK manual sesuai dengan RK online dalam aplikasi KRISNA.
- 3) Verifikasi Level 2 Pusat dilakukan oleh Verifikasi Level 2 Pusat untuk:
- a) Memeriksa kelengkapan chec-



- klist dokumen administrasi dan teknis secara menyeluruh.
- b) Melakukan penilaian kewajaran usulan program penanganan jalan daerah yang disampaikan daerah pada saat acara konsultasi program.
 - c) Melakukan koordinasi usulan program penanganan jalan bersama Dinas PU terkait dan Tim Pembina Provinsi (Satker P2JN/Balai/Dinas PU Provinsi/ Bappeda Provinsi). Kemudian dari hasil Tahap Verifikasi tahap-2 ini OPD Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan RK ke Verifikator-3.
- 4) Verifikasi Level 3 Pusat. Verifikator-3 bertugas untuk menyetujui Usulan Rencana Kegiatan (RK) DAK Jalan yang diusulkan oleh OPD Dinas PU Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Kegiatan Konsultasi Program DAK Fisik Bidang Jalan TA. 2021 diadakan secara daring melalui aplikasi Zoom dengan mengundang OPD yang sudah menyelesaikan persyaratan dokumen administrasi



Kegiatan Konsultasi Konsultasi Program DAK TA 2021 Bidang Jalan

yang diinput pada aplikasi SiPDJD. Selama tiga gelombang tersebut rincian OPD yang terundang dan berhasil menyelesaikan proses penyusunan RK adalah sebagai berikut:

Selanjutnya diadakan kegiatan Konsultasi Program Lanjutan DAK Fisik Bidang Jalan TA. 2021 selama 10 hari kerja terhitung dari tanggal 22 November - 4 Desember 2020. OPD yang diundang adalah yang belum menyelesaikan proses penyusunan RK DAK Fisik Bidang Jalan. Hingga tanggal 4 Desember 2020 pukul 20.30 total daerah yang menyelesaikan penyusunan RK dan melakukan lock approval pada aplikasi KRISNA adalah 509 daerah atau sama dengan 97.88% dari total daerah yang mendapatkan alokasi DAK Fisik TA. 2021 ■



EVALUASI KEGIATAN PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG JALAN DAN JEMBATAN TA. 2021

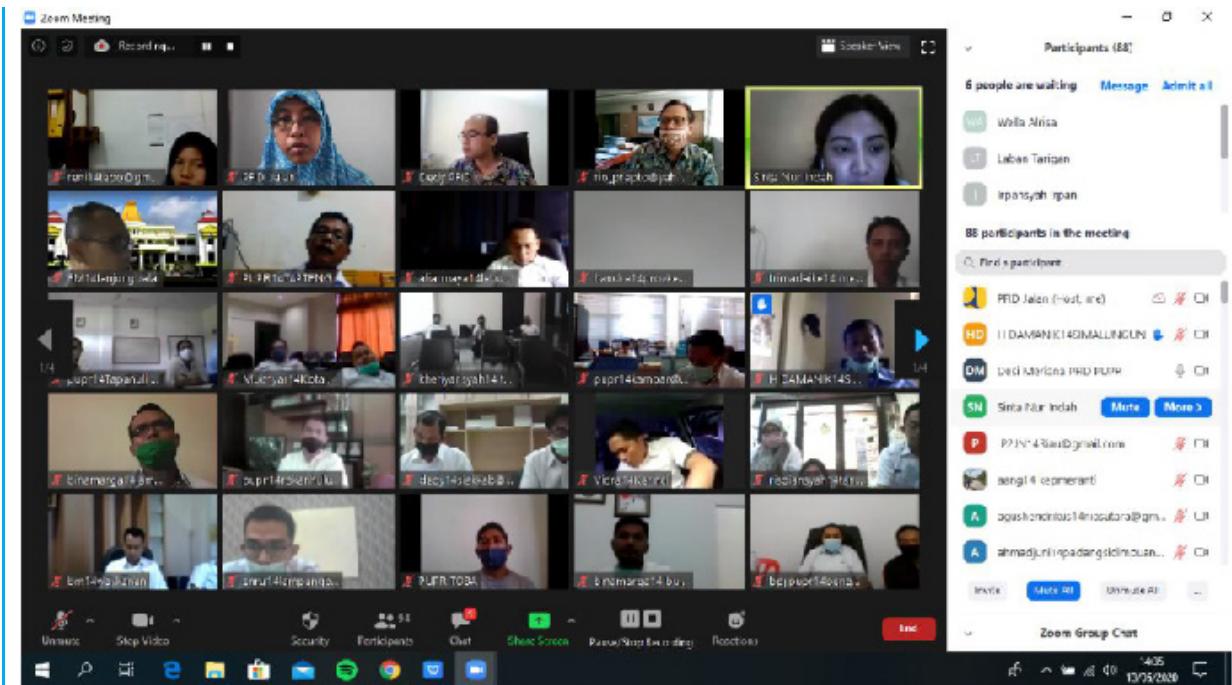
Oleh : Desi Meriana
Brigitta Yolanda
Sinta Nur Indah

Kegiatan Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan dan Jembatan TA. 2021 sudah selesai diselenggarakan pada awal Desember 2020 menjadi tanda telah selesainya rangkaian kegiatan perencanaan DAK Bidang Jalan dan Jembatan TA. 2021. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Bina Marga telah selesai menyusun Rencana Kegiatan (RK) melalui aplikasi KRISNA dan Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah juga sudah sele-

sai melakukan verifikasi seluruh usulan kegiatan DAK Bidang Jalan dan Jembatan. Sebagai hasil dari Kegiatan Konsultasi Program DAK tersebut adalah 509 OPD yang berhasil menyelesaikan proses penyusunan RK dari total 520 OPD atau sama dengan 97,88% dari total OPD yang mendapatkan alokasi DAK Bidang Jalan dan Jembatan TA. 2021.

Selain adanya OPD yang tidak dapat menyelesaikan proses penyusunan RK, terdapat pula OPD yang harus mengembalikan dana dari alokasi yang mereka dapatkan. Rincian alokasi DAK Bidang Jalan TA. 2021 dan total pengembalian dana adalah sebagai berikut:

No.	Jenis DAK	Total Alokasi (Rp)	Total Alokasi Approved (Rp)	Total Selisih Alokasi (Rp)	Persentase Alokasi Approved (Rp)
1	Reguler	7,282,400,000,000	6,945,833,032,298	336,566,967,702	95.38%
2	Penugasan	3,509,139,000,000	3,264,511,732,803	244,627,267,197	93.03%
TOTAL		10,791,539,000,000	10,210,344,765,102	581,194,234,898	



Kegiatan Sosialisasi Kebijakan DAK Bidang Jalan dan Jembatan TA. 2021 secara online

Presentase pembahasan usulan kegiatan DAK TA. 2021 yang tidak mencapai 100% dan juga alokasi dana yang tidak dapat dimanfaatkan optimal menjadi perhatian bagi penyelenggaraan kegiatan perencanaan di lingkungan OPD maupun Pusat sendiri. Beberapa kondisi ditemukan yang menyebabkan kondisi di atas. Pertama adalah banyaknya OPD yang sudah tidak memiliki stok program, padahal sisa alokasi yang didapatkan masih cukup besar. Tidak adanya stok program ini karena usulan kegiatan OPD sudah banyak ditolak pada saat fase Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan alasan tidak sesuai dengan kondisi data teknis jalan yang sudah terverifikasi. Selanjutnya adalah beberapa OPD juga mengusulkan kegiatan untuk ruas jalan yang sudah dalam kondisi mantap. Tentunya untuk kondisi mantap tidak dapat dilakukan kegiatan penanganan pemeliharaan jalan karena tidak sesuai dengan aturan yang tercantum pada Permen PU No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan

Penilikan Jalan. Salah satu kondisi lain yang terjadi adalah OPD tidak mempersiapkan DED (Detail Engineering Desain) dengan kontrak pihak ketiga untuk kegiatan pembangunan jalan dan penanganan jembatan. Sudah siapnya DED ini dimaksudkan agar kegiatan yang diajukan oleh OPD memiliki dasar yang kuat, baik dari kondisi, desain, dan juga rencana biaya, sehingga tidak akan terjadi penambahan biaya ke depannya tanpa perhitungan yang jelas. Kondisi-kondisi di atas dialami oleh kurang lebih 82 OPD penerima alokasi DAK Bidang Jalan TA. 2021.

Jika melihat ke tahap awal proses perencanaan DAK TA. 2021 yaitu Verifikasi Data Teknis Jalan Daerah didapatkan ada 20 OPD yang belum berhasil menyelesaikan verifikasi data teknis hingga batas waktu terakhir pada akhir bulan Juli 2020. Dalam pelaksanaannya sendiri, Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan sudah memberikan arahan dan bimbingan sejak awal

tahun 2020 melalui berbagai media sosial, serta melalui kegiatan sosialisasi secara daring melalui aplikasi teleconference. Namun pada akhirnya masih ada daerah yang tidak selesai dan mengakibatkan mendapatkan pinalti 100% atas alokasi DAK Bidang Jalan TA. 2021.

Hasil yang tidak optimal dari rangkaian proses kegiatan perencanaan DAK Bidang Jalan TA. 2021 ini karena beberapa kendala teknis yang harus lebih diperhatikan dan diingat agar tidak terjadi kembali. Pertama adalah melihat dari data teknis jalan. Banyak OPD yang belum siap data teknis usulan DAK dan tidak siap untuk diajukan ke unsur pusat yaitu di tingkat Balai/P2JN Bina Marga dan juga PFID. Selain itu OPD juga belum melakukan survei kondisi jalan dan jembatan sesuai dengan tata cara Bina Marga, Kementerian PUPR. Banyak survei yang dilakukan secara swakelola tetapi kondisinya belum mempunya SDMI yang paham tata cara survei kon-



 Tim Monitoring dan Evaluasi Bidang Jalan PFID

disi jalan. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi kualitas data teknis jalan yang dijadikan dasar sebagai pengusulan kegiatan pemeliharaan jalan dengan DAK.

Kedua dilihat dari proses penentuan usulan kegiatan penanganan jalan dan jembatan. OPD belum tertib mengenai kebijakan teknis bidang jalan saat proses penentuan usulan kegiatan DAK, terutama pada saat melakukan input usulan di KRISNA. Hal inilah yang membuat OPD tidak memiliki sisa stok program lagi pada saat proses penyusunan RK. Banyak OPD yang kurang tepat dalam menentukan jenis penanganan jalan dan jembatan sesuai dengan kondisi jalan daerah masing-masing.

Dalam mengatasi segala kendala yang ada, Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah telah mengupayakan untuk terus memberikan arahan dan informasi kepada OPD seperti melakukan pendampingan tata cara survei kondisi jalan, ke-

giatan sosialisasi arah kebijakan, dan pengumuman secara berkala melalui berbagai media sosial. Selain itu, setiap OPD juga memiliki verifikator masing-masing yang dapat mendampingi dalam seluruh rangkaian perencanaan kegiatan DAK Bidang Jalan dan Jembatan. Pemutakhiran teknologi juga diperlukan agar proses perencanaan menjadi lebih mudah, yaitu direncanakan adanya integrasi data kondisi jalan dan lebar badan jalan dari aplikasi SiPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah) milik Kementerian PUPR ke aplikasi KRISNA milik Bappenas. OPD diharapkan dapat menghindari dan meminimalisasi kendala teknis yang ditemui dalam proses perencanaan DAK Bidang Jalan dan Jembatan, terutama yang dihadapi pada proses sepanjang tahun 2020, terutama untuk lebih memperhatikan kebijakan teknis yang ada serta peraturan mengenai kegiatan pemeliharaan jalan.

Proses perencanaan DAK Bidang Jalan dan Jembatan merupakan rangkaian proses yang panjang, sehingga harus dibarengi dengan komitmen penuh dari OPD dan juga seluruh unsur pusat. Kesiapan ini dilaksanakan agar target kemantapan jalan Provinsi 75% dan Kabupaten/Kota 65% dapat tercapai. Hal lain yang menjadi catatan adalah kondisi pandemi Covid-19 saat ini mengakibatkan banyaknya pembatasan kegiatan. Namun proses tetap harus terlaksana secara optimal dan DAK Bidang Jalan dan Jembatan tahun berikutnya dapat tersalurkan dan dirasakan manfaatnya bagi daerah-daerah, diutamakan adanya peningkatan kualitas layanan pada akses menuju kawasan pangan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh OPD dan unsur pusat, diharapkan kegiatan DAK Bidang Jalan dan Jembatan ini terselenggara semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ■

UJI COBA PELAPORAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (SPM PUPR) BERBASIS APLIKASI

Oleh : Muhamad Aminudin Aziz

“Mewujudkan SPM PUPR yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar”



Kepala Bidang Perkim pada acara pembukaan Pelaporan capaian SPM PUPR

Kementerian PUPR sebagai salah satu kementerian teknis dalam penerapan SPM memiliki peran melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM secara teknis. Pembinaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi tahapan: pengumpulan data; penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, salah satunya melalui Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2020.

Dalam upaya pengawasan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/



Kabupaten/Kota dalam penerapan SPM PUPR, Kementerian PUPR mengembangkan aplikasi SPM PUPR guna mengontrol sejauh mana penerapan SPM PUPR yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan dikembangkannya aplikasi ini, maka Kementerian PUPR melaksanakan

uji coba pelaporan capaian SPM PUPR berbasis aplikasi untuk mengukur relevansi dengan kebijakan yang ada dan kemudahan penggunaan aplikasi oleh pemerintah daerah.

Tujuan pelaksanaan Uji Coba Pelaporan Capaian SPM PUPR



Berbasis Aplikasi adalah mengukur relevansi aplikasi dengan kebijakan yang ada, mengukur kemudahan penggunaan aplikasi (user friendly) oleh pemerintah daerah, Menginformasikan tentang perencanaan yang terintegrasi, dan mendapatkan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan dalam pengembangan aplikasi.

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan acara Uji Coba Pelaporan Capaian SPM PUPR Berbasis Aplikasi pada tanggal 27-28 November 2020 di Banana Inn Convention Center Hotel, Kota Bandung dan melalui video conference menggunakan aplikasi Zoom. Peserta yang hadir sebanyak 145 orang yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas pengampu air minum, sanitasi, dan perumahan dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Barat dan 3 kabupaten/kota pilot project.

Acara Uji Coba Pelaporan Capaian SPM PUPR Berbasis Aplikasi ini dilaksanakan dalam dua kegiatan, yaitu :

1. Sesi peno yang dimulai dengan pemaparan materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah narasumber selesai memaparkan materi. Narasumber kegiatan ini adalah dari:

- Direktorat Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas;
- Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri;
- Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;
- Biro Perencanaan, Sekretariat Utama, BNPB;

- Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat, BNPB;
- Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;
- Institut Teknologi Kalimantan.

2. Sesi pengenalan aplikasi yang disampaikan oleh programmer tentang penggunaan aplikasi dan data yang perlu dimasukkan ke dalam aplikasi.

Hasil dari pelaksanaan acara ini adalah peserta memahami penggunaan aplikasi dan mengetahui data yang perlu dimasukkan ke dalam aplikasi. Peserta berperan aktif dalam sesi pengenalan aplikasi dan banyak memberikan masukan terhadap aplikasi yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah ■

POTRET KABUPATEN MANGGARAI BARAT DALAM PELAKSANAAN DAK AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Oleh : Pujiati Rahayu



Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat

Kabupaten Manggarai Barat merupakan kabupaten yang terletak di wilayah bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai Barat berbatasan secara langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipisahkan oleh selat Sape. Keadaan topografi Kabupaten Manggarai Barat bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Ketinggian wilayah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan ketinggian yang bervariasi namun secara umum wilayah Kabupaten Manggarai Ba-

rat memiliki topografi berbukit-bukit hingga pegunungan. Wilayah administrasi kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12 Kecamatan yakni kecamatan Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Mbeliling, Lembor, Welak, Lembor Selatan, Kuwus, Ndoso, Macang Pacar, Kuwus Barat, dan Pacar.

Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pada tanggal 6 - 8 Desember 2020 di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ter-

kait penyelenggaraan infrastruktur air minum, sanitasi, dan perumahan yang dibiayai oleh DAK. Kegiatan ini terbagi dalam dua tahap kegiatan, yaitu Rapat Koordinasi dan Tinjauan Lapangan. Pada saat tinjauan lapangan dibagi 2 tim, 1 tim mengecek hasil pelaksanaan DAK Bidang Air Minum, dan 1 tim lainnya mengecek hasil pelaksanaan DAK Bidang Sanitasi dan Perumahan.

RAPAT KOORDINASI

Rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 7 Desember 2020 yang dibuka oleh Sekretaris Dinas. Kemudian dilanjutkan penyampaian mak-sud dan tujuan kunjungan oleh Sub-koordinator Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman, serta diskusi terkait penyelenggaran DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan di Kab. Manggarai Barat. Beberapa poin penting yang didapat dari rapat koordinasi adalah sebagai berikut.

- Isu permasalahan air minum: (i) cakupan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) baru mencapai 10% dan (ii) banyak lokasi desa yang rawan air minum, yaitu yang berada lebih tinggi daripada sumber air, sehingga untuk mendistribusikan air dibutuhkan teknologi yang advanced dan dana yang besar;
- Isu permasalahan sanitasi: belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); Dinas sudah menyiapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Detail Engineering Design (DED) namun untuk pembangunannya masih harus menunggu pendanaan.
- Isu permasalahan perumahan: (i) alokasi yang menurun dari tahun ke tahun; (ii) desa penerima DAK yang semakin sedikit, padahal masih banyak desa yang membutuhkan bantuan; (iii) harga satuan yang tidak mencukupi karena biaya material yang mahal terutama di pulau-pulau; (iv) Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang terbatas, 1 TFL tidak akan mampu menangani banyak desa karena kondisi topografi yang ekstrim, jarak antar desa yang jauh, serta akses yang sulit.



Rapat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat



Water meter di Desa Compang Liang Ndara



Reservoir di Desa Compang Liang Ndara

TINJAUAN LAPANGAN

Kegiatan yang dilakukan pada kunjungan lapangan adalah pengumpulan data realisasi keluaran (output) dan hasil jangka pendek (immediate outcome) sebagai berikut.

a. Kegiatan Pembangunan Broncatering TA 2017 di Desa Compang Liang Ndara ditargetkan menghasilkan keluaran (output)

sebanyak 96 Sambungan Rumah (SR). Berdasarkan keterangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Dusun, target tersebut tercapai 100%. PFID melakukan survei untuk mendapatkan data immediate outcome:

1) Pelayanan air minum belum memenuhi syarat kuantitas karena adanya konflik kepemilikan sumber air;

- 2) Pelayanan air minum belum memenuhi syarat kualitas; air keruh karena rusaknya katup penguras;
- 3) Pelayanan air minum belum memenuhi syarat kontinuitas karena pengaliran hanya 2 hari sekali, tidak 24 jam/hari;
- 4) Pelayanan air minum telah memenuhi syarat keterjangkauan lokasi; sumber air berada di halaman rumah; dan
- 5) Pelayanan air minum tidak memenuhi syarat keterjangkauan tarif; masyarakat keberatan untuk membayar tarif air minum.

b. Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Secara Swadaya TA 2018 di Watu Nggelek ditargetkan menghasilkan keluaran (output) sebanyak 3 rumah. Berdasarkan keterangan dari staf Dinas, target tersebut tercapai 100%. PFID melakukan survei 1 rumah tangga penerima bantuan DAK untuk mendapatkan data immediate outcome:

- 1) Rumah yang dibangun memenuhi syarat ketahanan bangunan; baik atap, lantai, maupun dinding menggunakan material yang layak;
- 2) Rumah yang dibangun memenuhi syarat kecukupan luas; rumah seluas 42 m² dihuni 4 orang yang berarti memenuhi standar >7,2 m²/jiwa;
- 3) Rumah yang dibangun telah dilengkapi dengan akses air minum yang layak, yaitu dari Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan PDAM; dan
- 4) Rumah yang dibangun belum dilengkapi dengan akses sanitasi yang layak: (i) belum ada bangunan sebagai sarana mandi, cuci, dan kakus serta tangki septik yang layak dan (ii) belum ada tempat sampah yang layak, sampah dikumpulkan bersama sampah dari rumah tangga lain



 Tangki septic konvensional di Desa Gorontalo

pada satu titik untuk dibakar.

c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya TA 2018 di Watu Nggelek ditargetkan menghasilkan keluaran (output) sebanyak 5 rumah. Berdasarkan keterangan dari staf Dinas, target tersebut tercapai 100%. PFID melakukan survei 1 rumah tangga penerima bantuan DAK untuk mendapatkan data immediate outcome:

- 1) Rumah yang dibantu belum memenuhi syarat ketahanan bangunan; baik atap, lantai, maupun dinding belum menggunakan material yang layak;
- 2) Rumah yang dibantu memenuhi syarat kecukupan luas; rumah seluas 100 m² dihuni 5 orang yang berarti memenuhi standar >7,2 m²/jiwa;
- 3) Rumah yang dibantu telah dilengkapi dengan akses air minum yang layak, yaitu dari Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan PDAM; dan
- 4) Rumah yang dibantu belum dilengkapi dengan akses sanitasi yang layak: (i) belum ada banungan sebagai sarana mandi, cuci, dan kakus serta tangki septik yang layak dan (ii) belum ada tempat sampah yang



 Penerima bantuan Peningkatan Kualitas di Desa Watu Nggelek

layak, sampah dikumpulkan bersama sampah dari rumah tangga lain pada satu titik untuk dibakar.

d. Kegiatan Pembangunan Tangki Septik Individual TA 2020 di Desa Watu Nggelek ditargetkan menghasilkan keluaran (output) sebanyak 95 tangki septic individual, namun belum ada yang terealisasi karena tangki septik fabrikasi masih dalam proses pengiriman dari Surabaya.

e. Kegiatan Pembangunan Tangki Septik Individual TA 2020 di Desa Gorontalo ditargetkan menghasilkan keluaran (output) sebanyak 92 tangki septic individual. Berdasarkan keterangan dari ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), target tersebut tercapai 80% berupa 74 tangki septic konvensional. PFID melakukan survei 1 rumah tangga penerima bantuan DAK untuk mendapatkan data immediate outcome:

- 1) Rumah tangga menggunakan jamban sendiri, tidak bersama rumah tangga lain sesuai standar mutu. Jamban berada di halaman rumah karena memang budaya di Kab. Manggarai Barat adalah tidak menyediakan jamban di dalam rumah;

- 2) Jenis jamban yang digunakan adalah leher angsa sesuai standar mutu;
- 3) Teknologi pengolahan air limbah yang digunakan adalah tangki septic yang benar-benar kedap sesuai standar mutu; dan
- 4) Belum ada sistem pengolahan lumpur tinja dari tangki septic karena Kab. Manggarai Barat belum memiliki IPLT.

Penyelenggaraan kegiatan DAK di Kabupaten Manggarai Barat secara keseluruhan telah berjalan cukup baik, dilihat dari segi administrasi maupun pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya, hanya saja masih ada permasalahan oleh beberapa pemangku kepentingan di Desa Compang Liang Ndara, Kecamatan Mbeliling sehingga akan diadakan pembahasan antara camat dengan mengundang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Manggarai Barat untuk membahas konflik kepemilikan sumber air, tepatnya permasalahan izin penggunaan air baku ■



Kegiatan Konsultasi Program pada Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah

KONSULTASI PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK INFRASTRUKTUR PUPR TA. 2021

Oleh : Hidemiwan

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2020 Perihal Petunjuk Operasional Penyelegaran Dana Alokasi Khusus Infrastruktur, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah mempunyai tugas untuk pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan infrastruktur daerah, terutama untuk kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

Alokasi DAK Infrastruktur PUPR Tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp. 19,79 T, untuk 33 Provinsi dan 506 Kabupaten/Kota. Alokasi tersebut meningkat Rp. 8,35 T (73%) dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

Terdapat sejumlah target yang perlu dicapai melalui alokasi tersebut, yang meliputi:

- a. Kondisi mantap jalan daerah sebesar 75% untuk jalan provinsi, dan 65% untuk jalan kabupaten/kota.
- b. Pembangunan/peningkatan daerah irigasi seluas 41.488 Ha, rehabilitasi daerah irigasi seluas 298.028 Ha, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 18 Km.
- c. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 91,98% (termasuk akses aman 8,4%).
- d. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak sebesar 79,43% (termasuk akses aman 11%).

e. Rumah tangga yang menempati hunian layak sebesar 62,32%.

Konsultasi Program DAK Fisik Infrastruktur TA. 2021 telah dilaksanakan secara daring melalui zoommeeting dengan melibatkan seluruh peserta baik dari Pusat, Bappeda dan Dinas (daerah). Pelaksanaan konsultasi program diawali dengan Kickoff Meeting pada tanggal 13-15 Oktober 2020 dibuka oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Ibu Prof. Anita Firmanti, dan dihadiri oleh Narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan arahan mengenai pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Kegiatan Kickoff Meeting juga merupakan bentuk

persiapan dalam menghadapi kegiatan Konsultasi Program DAK Fisik TA. 2021 yang dibagi menjadi 4 Gelombang.

Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah sebagai Koordinator penyelenggaran acara Konsultasi Program, telah menyelenggarakan Konsultasi Program DAK Infrastruktur PUPR TA. 2021 secara daring melalui zoommeeting pada tanggal 25 Oktober - 4 Desember 2020 dengan mengundang 520 Pemda penerima Alokasi DAK Infrastruktur, dengan tujuan menyampaikan kebijakan pengalokasian, pemanfaatan DAK Infrastruktur PUPR TA 2021 dan Melakukan pembahasan Rencana Kegiatan (RK) pemanfaatan DAK Infrastruktur PUPR 2021 per bidang, per Pemda. Adapun pembagian bidang meliputi Bidang Pelaksanaan Jalan dan Jembatan, Bidang Pelaksanaan Sumber Daya Air, serta Bidang Pelaksanaan Perumahan dan Permukiman.

BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

Penyelenggaraan kegiatan Konsultasi Program DAK Fisik Bidang Jalan TA 2021, diselenggarakan secara daring melalui zoommeeting dan dibagi menjadi 3 (tiga) gelombang yaitu Gelombang I (satu) dilaksanakan pada tanggal 02 - 06 November 2020, Gelombang II (dua) dilaksanakan pada tanggal 09 - 13 November 2020, Gelombang III (tiga) dilaksanakan pada tanggal 16 - 20 November 2020. Peserta merupakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sudah melengkapi dokumen administrasi yang di-input ke dalam aplikasi SiPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah) dan sudah mendapatkan nomor antrian. OPD kemudian akan hadir sesuai dengan jadwal yang tertera dan mengikuti acara sesuai dengan agenda acara.

Pada Gelombang I (Satu), Tim Verifikator Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan berkumpul untuk melakukan konsultasi di Hotel Bigland, Kota Bogor. Gelombang II (Dua), Tim Verifikator Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan berkumpul untuk melakukan konsultasi di Hotel Horison, Kota Bekasi. Gelombang III (Tiga), Tim verifikator Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan berkumpul untuk melakukan konsultasi ini di Hotel Grand Zuri, Tangerang Selatan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan dibagi menjadi dua sesi yaitu Sesi Pleno dan Sesi Desk. Sesi pleno terdiri dari sambutan serta arahan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur PUPR dari Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah serta penjelasan Mekanisme Desk yang disampaikan oleh Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan.

Sesi desk merupakan sesi konsultasi pembahasan usulan Rencana Kegiatan DAK Fisik TA. 2021 yang sudah disusun oleh OPD di aplikasi KRISNA. Sesi desk dilakukan secara berjenjang mulai dari Verifikator 1 hingga Verifikator 3 yang berasal dari Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan, PFID.

BIDANG IRIGASI

Kegiatan Konsultasi Program Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Bidang Irigasi TA 2021 diselenggarakan secara daring melalui zoommeeting dan dibagi menjadi menjadi 4 Gelombang. Gelombang I (Satu) Tim Verifikator melaksanakan verifikasi pada tanggal 20-23 Oktober 2020 di Hotel Horison Ciawi, Kota Bogor. Peserta pada gelombang I meliputi kabupaten di Provinsi Bengkulu, Banten, Jawa

Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat beserta BBWS/BWS. Sedangkan pada Gelombang II (dua), Tim Verifikator melaksanakan verifikasi pada tanggal 02-06 November 2020 di Mirah Hotel, Kota Bogor, Jawa Barat. Peserta pada gelombang II meliputi kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara beserta BBWS/BWS.

Gelombang III (tiga) Tim Verifikator melaksanakan verifikasi pada tanggal 09-13 November 2020 di Horison Hotel, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peserta pada gelombang III meliputi kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Di.Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara beserta BBWS/BWS.sedangkan pada Gelombang IV dilaksanakan pada tanggal 16-20 November 2020 di Hotel Grand Zuri Bintaro, Tangerang Selatan. Peserta pada gelombang IV meliputi kabupaten di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Lampung beserta BBWS/BWS.

Peserta yang telah mengikuti panel langsung dibagi berdasarkan desk yang telah ditentukan melalui breakout rooms pada aplikasi zoom meeting. Jika pemda sudah lolos dari verifikator I maka akan dilanjutkan ke verifikator II untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dan verifikator III untuk mendapat persetujuan tandatangan rencana kegiatan bidang irigasi TA. 2021.

TABEL REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN (RK) PADA APLIKASI KRISNA

No	Bidang	Data Alokasi DAK 2021		Pemda Selesai Pembahasan RK			Pemda telah disetujui (Sign Digital) Kemen PUPR dalam KRISNA DAK		
		Jumlah Pemda	Alokasi (Rp Juta)	Jumlah Pemda	% Pemda	Alokasi (Rp Juta)	Jumlah Pemda	% Pemda	Alokasi (Rp Juta)
1.	Irigasi	406	3.000.000	398	98,0%	2.903.015	397	97,8%	2.896.993
2.	Jalan	520	10.791.539	509	98,0%	10.210.344	509	98,0%	10.210.344
3.	Air Minum	477	3.000.000	477	100%	3.000.000	465	97,5%	2.966.815
4.	Sanitasi	483	2.000.000	483	100%	2.000.000	470	97,3%	1.953.166
5.	Perumahan:								
	Swadaya	354	904.189	354	100%	904.189	343	96,9%	781.441
	Khusus	24	95.810	24	100%	95.810	22	91,7%	85.380
Total		520	19.791.538			19.113.358			18.894.139

BIDANG AIR MINUM, SANITASI DAN PERUMAHAN

Kegiatan Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan secara daring melalui zoommeeting dan dibagi menjadi menjadi 4 Gelombang. Gelombang 1 (satu) Tim Verifikator melaksanakan verifikasi pada tanggal 26 - 27 Oktober 2020 di di Hotel Novotel Kota Tangerang, dilanjutkan gelombang 2 (dua) pada 2 - 6 November 2020 di Hotel Sahira butik Kota Bogor, kemudian gelombang 3 (tiga) pada 9 - 13 November 2020 Hotel Novotel Kota Tangerang, dan gelombang 4 (empat) pada 16 - 20 November 2020 Hotel Padajaran Suite Kota Bogor.

Gelombang 1 (satu) dilaksanakan melibatkan peserta dari Pemerintah Daerah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Dengan rincian Bidang Air Minum sebanyak 37 Kabupaten/Kota; Bidang Sanitasi sebanyak 38 Kabupaten/Kota; Bidang Perumahan sebanyak 33 Kabupaten/Kota.

Pada Gelombang 2 (dua) dilaksanakan melibatkan peserta dari Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, NTT, Papua, Papua Barat. Dengan rincian Bidang Air Minum sebanyak 133 Kabupaten/Kota; Bidang Sanitasi sebanyak 140 Kabupaten/Kota; Bidang Perumahan sebanyak 112 Kabupaten/Kota untuk bidang Perumahan Swadaya dan 24 Kabupaten/Kota untuk bidang Perumahan Khusus.

Gelombang 3 (tiga) dilaksanakan melibatkan peserta dari Pemerintah Daerah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Dengan rincian Bidang Air Minum sebanyak 158 Kabupaten/Kota; Bidang Sanitasi sebanyak 157 Kabupaten/Kota; Bidang Perumahan sebanyak 128 Kabupaten/Kota.

Gelombang 4 (empat) dilaksanakan melibatkan peserta dari

Pemerintah Daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung. Dengan rincian Bidang Air Minum sebanyak 146 Kabupaten/Kota; Bidang Sanitasi sebanyak 143 Kabupaten/Kota; Bidang Perumahan sebanyak 81 Kabupaten/Kota.

HASIL KEGIATAN KONSULTASI PROGRAM

Hasil pembahasan konsultasi program yaitu berupa persetujuan Kementerian PUPR dalam Aplikasi KRISNA DAK, yang merupakan salah satu syarat penyaluran/transfer DAK dari Kementerian Keuangan kepada Rekening Pemda.

Berdasarkan rekapitulasi, jumlah pemda yang menyelesaikan pembahasan RK sebanyak 509 Pemda atau 97,9 % dari Pemda penerima alokasi DAK TA 2021 dan jumlah alokasi yang dimanfaatkan sebesar Rp 19.113.358.000 atau 96,58% dari alokasi DAK TA 2021 ■

PENYUSUNAN SKP DAN INPUTTING E-KINERJA (DI BOGOR TANGGAL 06 s/d 08 OKTOBER 2020)

Oleh : Reza Wahyu. P



Kepala PFID memberikan sambutan dalam acara penyusunan SKP dan Inputting E-Kinerja

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada 26 April 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai

Negeri Sipil (PNS). Oleh Karena itu, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah menyelenggarakan kegiatan penyusunan skp dan inputting e-kinerja yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 06-08 Oktober 2020. Kegiatan Penyusunan SKP dan Inputting e-Kinerja di Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah ini dilaksana-

nakan dalam rangka mempercepat proses penyusunan SKP transisi/perubahan dari struktur organisasi yang lama menjadi struktur organisasi yang baru sesuai Permen 13 Tahun 2020 khususnya dengan adanya penyetaraan jabatan struktural yaitu administrator dan pengawas menjadi Pejabat



Kegiatan Penyusunan SKP PFID 06-08 Oktober 2020



Fungsional yang harus membuat target SKP sesuai dengan tugas dan fungsi yang baru serta mendapatkan penjelasan pengisian realisasi SKP di akhir tahun secara mandiri.

Adapun Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu adalah Memberikan pemahaman terkait Penyusunan SKP dan Input SKP kedalam e-kinerja agar tidak ada kesalahan dalam penyusunan dan input SKP kedalam e-kinerja.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dengan narasumber kegiatan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai Pembina SKP di Kementerian PUPR.

Dalam Sambutannya, Bapak Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah menyebut-

kan bahwa SKP bagi pejabat pimpinan tinggi disusun berdasarkan perjanjian kinerja Unit Kerja masing-masing dengan memperhatikan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja tahunan. SKP dilakukan setiap tahun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dilakukan dan ditetapkan awal tahun yaitu pada bulan Januari.
2. Realisasi dan Penilaian Kinerja PNS dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan januari tahun berikutnya.

Bapak Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah juga menyebutkan bahwa Penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas SDM PNS, serta kegiatan perancangan pekerjaan PNS dalam organisasi. Penilaian prestasi kerja PNS juga dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan PNS dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya dan juga sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan PNS yang berkaitan dengan pola karier dan pro-



Sesi foto Bersama Kegiatan Penyusunan SKP dan Inputting E-Kinerja PFID

gram pendidikan dan pelatihan dalam organisasi. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap PNS untuk dapat menyusun SKP dan melaksanakan target SKP dengan sebaik-baiknya

SKP bagi pejabat administrasi disusun berdasarkan SKP atasan langsung dengan memperhatikan organisasi dan tata kerja Kementerian PUPR (Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2019) serta uraian jabatan masing-masing.

Disampaikan juga dalam laporan Ketua Panitia Pelaksana Yaitu Bapak Kepala Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah bahwa Diantara kesibukan-kesibukan bapak/ibu dalam melaksanakan kegiatan teknis setiap hari untuk mengejar target rencana program kerja yang telah disusun tiap tahun, kita ternyata masih harus memperhatikan urusan administrasi kepegawaian kita seperti tertib absen, mengisi spt, mengupdate data e-hrm, atau pengembangan kapasitas kita sebagai SDM PUPR seperti mengikuti assessment

apabila dipanggil untuk assessment baik assessment untuk pemetaan potensi, untuk promosi dan sebagainya, kemudian panggilan diklat-diklat jafung, diklat-diklat kepemimpinan yang bertujuan untuk pengembangan kapasitas diri sebagai ASN PUPR. Demikian pula penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang merupakan bagian dari tahap-tahap penilaian proses dan hasil kerja/kinerja kita tiap tahun yang merupakan implementasi dari penjabaran/pelaksanaan program kerja 5 tahunan yang tersusun dalam renstra. Jadi walaupun ditengah kesibukan kita mengerjakan pekerjaan teknis, pengisian lembar SKP ini sangat dikhawatirkan oleh unit organisasi yang berwenang / bertanggung jawab dalam pemantauan / pengembangan kapasitas SDM kementerian, karena melalui table dalam SKP ini rencana kerja diawal tahun dan realisasinya di akhir tahun dapat dipantau dan dinilai.

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah saat ini memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 42 orang. Terdapat 20 Pejabat Fungsional Aktif dan 5 Pejabat Fungsional non aktif (karena sedang menduduki jabatan struktural). Di Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah saat ini terdapat 7 jenis jabatan fungsional yaitu, Jafung Perencana, Jafung Arsiparis, Jafung Teknik Jalan Jembatan, Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan, Jafung Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Jafung Teknik Pengairan, Jafung Pengelola Pengadaan Barang Jasa, Jafung Surveyor Pemetaan, Jafung Analis Kebijakan, Jafung Pranata Komputer dan Jafung Pranata Humas. Diharapkan dengan adanya kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Penyusunan Daftar Usul Penerapan Angka Kredit (DUPAK) di Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dapat meningkatkan kinerja dan output Pejabat Fungsional dilingkungan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan memudahkan Pejabat Fungsional dalam Menyusun DUPAK ■



KEMENTERIAN PUPR
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH
TAHUN 2021

JANUARI

Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

1 Tahun Baru 2021

FEBRUARI

Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
					3	4
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

12 Tahun Baru Imlek

MARET

Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
					3	4
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

11 Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW

12 Cuti Bersama Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW

14 Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 194

APRIL

Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

2 Wafat Isa Al Masih

MEI

Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

1 Hari Buruh Internasional

12 Cuti Bersama Idul Fitri 1442 H

13 Kenaikan Isa Al Masih

14 Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah

17-18 Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri

26 Hari Raya Waisak 2565

JUNI

Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

1 Hari Lahir Pancasila

JULI

Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

20 Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah

AGUSTUS

Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

10 Tahun Baru Islam 1443 Hijriah

17 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

SEPTEMBER

Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

OKTOBER

Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

19 Maulid Nabi Muhammad SAW

NOVEMBER

Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

DESEMBER

Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

24 Cuti Bersama Hari Raya Natal

25 Hari Raya Natal

27 Cuti Bersama Hari Raya Natal

3 Hari Bhakti PU